

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan data yang telah diperoleh , dan hasil analisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Total belanja pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat dari tahun 2009 sampai dengan 2016 adalah 24 triliun rupiah, dimana didalamnya terdapat belanja modal yaitu sekitar 5 triliun rupiah. Dari belanja modal ini total realisasi anggaran yang digunakan untuk program pembangunan pasca bencana adalah sekitar 1,4 triliun rupiah.
2. Program pemerintah untuk program realisasi pasca bencana dalam kurung waktu 8 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai dengan 2016 ada 12 program yang meliputi kegiatan-kegiatan rincian dalam melaksanakan pembangunan pasca bencana.
3. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang mengeluarkan dana terbesar adalah pada tahun 2010, yakni setahun setelah bencana gempa terjadi di Sumatera Barat. Dimana pembangunan terbanyak yaitu pembangunan sarana pemerintahan dan sarana pendidikan.
4. Anggaran dana pada tahun 2009, sesaat setelah salah satu bencana di Sumatera Barat terjadi tidak langsung dari anggaran yang telah dianggarkan pada tahun tersebut. Anggaran yang digunakan merupakan anggaran perubahan yang ditetapkan setelah bencana

terjadi, sehingga pada tahun 2009 ini hanya ada 2 program rehabilitas pasca bencana.

5. Dalam melaksanakan program rehabilitas dalam bentuk pembangunan pasca bencana, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program terbanyak adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dimana pembangunan dilaksanakan padan seluruh tahun penelitian yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.
6. Untuk Kepulauan Mentawai, pembangunan terjadi hanya pada tahun 2011 dan 2016 yang menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk tahun 2009, 2010, 2012, 2013, dan 2014 menggunakan anggaran langsung dari APBN pusat.
7. Berdasarkan analisa, jumlah unit pembangunan infrastruktur terbanyak selama tahun penelitian adalah Kota Padang, yang berjumlah sekitar 173 unit. Hal ini dikarenakan banyak pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi bangunan pemerintahan provinsi yang terletak di Kota Padang.

5.2 Saran

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan :

1. Penelitian dapat menganalisa pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat berdasarkan APBN.
2. Penelitian dapat menganalisa pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat berdasarkan APBD kabupaten kota.

3. Penelitian dapat menganalisa pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat berdasarkan sumbangan masyarakat.

